KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fadli: Kami Berpijak Pada Aturan: Ade Komarudin Diresmikan Jadi Ketua DPR Pekan Depan
Tanggal : Sabtu, 09 Januari 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Fadli: Kami Berpijak Pada Aturan

Ade Komarudin Diresmikan Jadi Ketua DPR Pekan Depan

Pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto tinggal menghitung hari. Pimpinan DPR telah mengabarkan akan melantik Ade awal pekan depan.

PELAKSANA Tugas Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Ade Komarudin akan dilantik sebagai Ketua DPR pada Senin pekan depan dalam rapat paripurna. "Ya segera. Senin," kata Fadli di Gedung Nusantara III DPR Senayan, Jakarta, kemarin.

Walaupun masih terdapat kekisruhan di tubuh Partai Golkar, DPR akan tetap mengangkat Ade Komarudin karena telah ditetapkan dalam rapat paripurna pada 18 Desember 2015, sebelum masa reses dimulai.

"Kami kan berpijaknya pada aturan. Nggak bisa berpijak pada pendapat," kata Fadli.

Fadli menambahkan, Senin depan sebelum melantik Ade Komaruddin pimpinan DPR akan terlebih dahulu melangsungkan rapat sebelum paripurna pembukaan masa sidang. Dijelaskannya, agenda pelantikan Ketua DPR baru itu sudah ditentukan Badan Musyawarah DPR. Namun karena butuh, misal hakim MA untuk pengambilan sumpah, maka perlu dibahas lagi di tingkat pimpinan dewan.

Sementara terkait surat perombakan Fraksi Golkar, Fadli mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapat surat dari DPP Golkar menyangkut hal itu. Selama ini, ujar dia, perubahan fraksi hanya diberitahukan oleh DPP partai bersangkutan ke DPR.

Yang jelas, kata dia, terkait dengan perubahan Fraksi Partai Golkar itu, pimpinan DPR akan berpedoman pada fraksi yang selama ini diakui.

"Kami berdasarkan fraksi yang diakui di DPR saja," ujarnya.

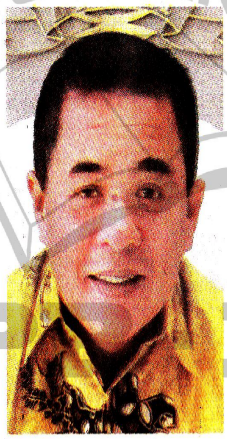

Ade Komarudin

Adapun fraksi yang selama diakui di DPR adalah Fraksi Partai Golkar hasil Munas Bali yang diketuai oleh Ade Komarudin.

Menurut Fadli, perubahan susunan pimpinan fraksi merupakan hak penuh setiap partai. "Kami tidak bisa menentukan boleh atau tidak karena itu bukan kewenangan pimpinan atau lembaga, itu hak partai," kata Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Namun, untuk pengesahan perubahan tersebut, Fadli mengatakan tetap harus melalui Surat Keputusan pimpinan DPR. "Kalau kepengurusan fraksi iya. Tapi untuk perubahan alat kelengkapan dewan tidak," katanya.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga mengaku belum menerima surat pergantian komposisi di Fraksi Golkar. "Usulan perombakan dari fraksi mana pun belum saya terima. Sampai kemarin saya di sini belum ada," kata politikus dari Partai Demokrat itu.

Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan, pimpinan DPR memang seyogyanya melantik Ketua DPR yang berasal dari Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie yang mengusung Ade Komarudin. Ini dikarenakan Kubu Aburizal Bakrie telah terbukti memenangkan putusan pengadilan.

"Putusan pengadilan lebih tinggi dibandingkan dengan SK Kemenkumham, jadi dasar hukumnya langsung putusan pengadilan berdasarkan prinsip res judicata," ujar Irman

Saat ini, terdapat dua nama yang diusulkan oleh Golkar untuk menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Nama yang pertama adalah Ade Komarudin, calon Ketua DPR yang diusulkan oleh kubu Aburizal Bakrie. Sementara itu, Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono juga mengajukan calon Ketua DPR, yakni Agus Gumiwang.

Akan tetapi, kubu Agung meminta pimpinan DPR menunda pelantikan Ketua DPR yang baru hingga kekisruhan di tubuh Golkar selesai. Hal itu menyusul dicabutnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pencabutan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Dengan dicabutnya SK tersebut, menurut kubu Agung, terjadi kekosongan kekuasaan dalam tubuh Golkar. ■ ONI